

BAB I

PENDAHULUAN

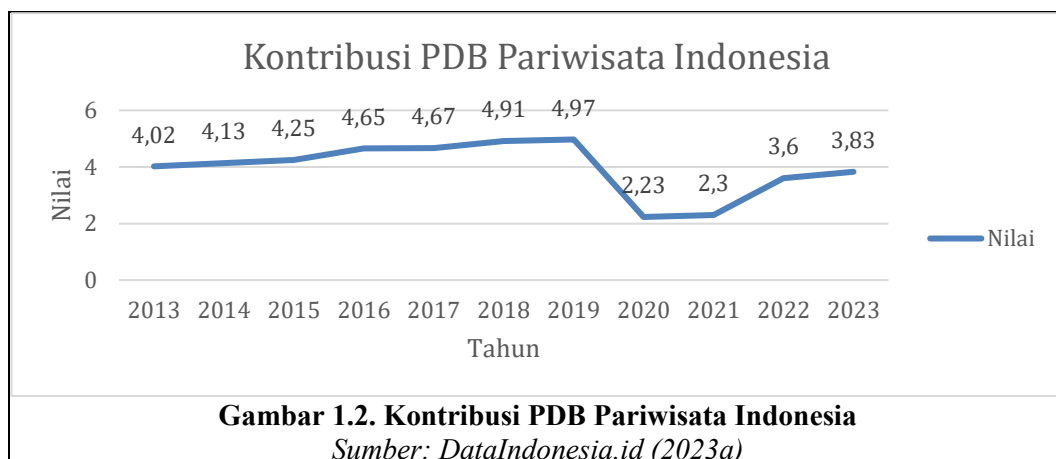
1.1. Latar belakang penelitian

Sektor pariwisata memainkan peran besar dalam perekonomian global. UNWTO (2024) melaporkan bahwa pada tahun 2023 pariwisata menyumbang 10% dari Produk Domestik Bruto (PDB) global dan menyerap 319 juta tenaga kerja. Pertumbuhannya menuntut pengelolaan yang seimbang pada tiga dimensi, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi, agar pembangunan berlangsung secara berkelanjutan (Nguyen dkk., 2023).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakui pariwisata sebagai katalisator pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Tiga tujuan SDGs secara eksplisit menyebutkan pariwisata: pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8), konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (SDG 12), serta ekosistem laut (SDG 14). Secara tidak langsung, pariwisata berkontribusi pada seluruh 17 tujuan SDGs (UNWTO & UNDP, 2017), mulai dari pengentasan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, pelestarian warisan budaya, hingga mitigasi perubahan iklim (Gambar 1.1).



Indonesia merespons agenda tersebut dengan menempatkan pariwisata sebagai industri strategis nasional. Kontribusi pariwisata terhadap PDB Indonesia tercatat sebesar 3,83% hingga September 2023, naik dari 3,6% pada 2022 (DataIndonesia.id, 2023a). Tren ini mencerminkan keberhasilan pengelolaan destinasi yang memadukan pelestarian alam, perawatan warisan budaya, dan promosi pariwisata berkelanjutan (Gambar 1.2). Pada 2021, Indonesia berada di peringkat ke-32 dalam pemeringkatan daya saing pariwisata global berdasarkan Indeks Pengembangan Perjalanan dan Pariwisata (World Economic Forum, 2022; DataIndonesia.id, 2023b).



Pandemi Covid-19 pada 2020–2022 memukul sektor pariwisata global. Pemulihan melalui pendekatan kenormalan baru–pariwisata baru (*New Normal – New Tourism*) membuka peluang bagi desa wisata. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD, 2018, dalam Wirdayanti dkk., 2021, h. 25) mencatat pergeseran tren perjalanan wisatawan dari wisata massal (*mass tourism*) menuju wisata alternatif (*alternative tourism*) yang berorientasi pada wisata alam dan budaya lokal untuk meningkatkan wawasan, petualangan, dan pengalaman langsung, termasuk wisata perdesaan (*village tourism*) sebagaimana ditawarkan oleh desa wisata.

Desa wisata menempati posisi strategis dalam pergeseran tersebut. Konsep ini berkembang sejak 1970-an dan memperoleh pengakuan resmi pada 1980-an (Eko dkk., 2014). Konsep ini tumbuh melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas setempat, serta kini menjadi model pariwisata berkelanjutan yang memadukan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan (Suwidnyana dkk., 2025; Setyawati dkk., 2024; Wirdayanti dkk., 2021). Landasannya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 yang menambahkan pariwisata berbasis masyarakat lokal sebagai materi muatan yang diatur. Dari 84.291 wilayah setingkat desa di Indonesia (Badan Pusat Statistik [BPS], 2025), 6.262 telah terdaftar sebagai desa wisata dalam Jaringan Desa Wisata Indonesia (JADESTA) per Juni 2026, meningkat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan 1.831 desa pada 2021 (Jadesta, 2026). Perkembangannya dan sebarannya ditunjukkan pada Gambar 1.3 dan 1.4.



Kemenparekraf mengklasifikasikan desa wisata ke dalam empat kategori: rintisan, berkembang, maju, dan mandiri (Wirdayanti dkk., 2021). Namun, data menunjukkan kesenjangan yang mencolok. Sebaran kategorinya per 10 Juni 2026 mencatat 6.263 desa, yaitu hanya 36 desa (0,6%) tergolong mandiri, 329 desa (5,3%) maju, 1.016 desa (16,2%) berkembang, dan 4.882 desa (77,9%) masih berstatus rintisan (Gambar 1.5; selisih satu desa terhadap angka pendaftaran di atas berasal dari perbedaan tanggal penarikan data Jadesta). Kondisi tersebut

mencerminkan persoalan tata kelola yang belum terselesaikan: lemahnya koordinasi antarpemangku kepentingan, terbatasnya pemahaman tentang tata kelola yang efektif, serta tidak adanya kerangka pengembangan yang jelas (Ariyani dkk., 2023; Afriza & Hidayat, 2023; Wibowo dkk., 2022; Prafitri & Damayanti, 2016). Sekitar 95% desa wisata masih terhambat oleh keterbatasan aksesibilitas, lemahnya perencanaan, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia (Amilia dkk., 2020; Shofiana & Muhtadi, 2023).



Kesenjangan tersebut perlu dibaca sebagai persoalan pengelolaan, bukan sekadar persoalan jumlah. Empat dari lima desa wisata berhenti pada tingkat rintisan terutama karena kapasitas kelembagaan pengelolanya belum terbangun, bukan karena kekurangan daya tarik saja: struktur pengelola belum mapan, pembagian peran antarpemangku kepentingan belum jelas, kemampuan mengelola keuangan dan sumber daya manusia masih terbatas, serta mekanisme pertanggungjawaban

kepada warga belum berjalan. Dalam kajian administrasi publik, persoalan semacam itu berada pada wilayah manajemen publik, yaitu bagaimana urusan publik dikelola secara efektif ketika kewenangan tidak berada pada satu tangan, melainkan tersebar di antara pemerintah, komunitas, dan pihak swasta. Karena itu, penelitian ini menempatkan tata kelola kolaboratif sebagai persoalan pengelolaan bersama dan menelaah bagaimana kapasitas kelembagaan yang menopangnya dibangun serta dipertahankan dalam jangka panjang.

Pada 2020, Kemenparekraf membentuk Dewan Pariwisata Berkelanjutan Indonesia (Indonesia Sustainable Tourism Council atau ISTC) untuk mempercepat sertifikasi destinasi berkelanjutan berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016. Hingga 2022, tercatat 36 desa wisata (setara sekitar 0,6% dari jumlah desa wisata saat ini) yang bersertifikat, sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.1. Jumlah desa bersertifikat ini kebetulan sama dengan jumlah desa berkategori mandiri pada Gambar 1.5, meskipun keduanya merupakan dua penilaian yang berbeda, yaitu sertifikasi destinasi berkelanjutan dan penggolongan tingkat perkembangan.

Tabel 1.1 Daftar Desa Wisata Tersertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan di Indonesia Tahun 2020 sampai 2022

No	2020	2021	2022
1	Desa Wisata Adat Osing Kemiren, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur	Desa Wisata Arborek, Kab. Raja Ampat, Papua Barat Daya	Desa Wisata Alamendah, Kab. Bandung, Jawa Barat
2	Desa Wisata Batulayang, Kab. Bogor, Jawa Barat	Desa Wisata Cibuntu, Kab. Kuningan, Jawa Barat	Desa Wisata Dieng Kulon, Kab. Banjarnegara, Jawa Tengah
3	Desa Wisata Bilebante, Kab. Lombok Tengah, NTB	Desa Wisata Gubugklakah, Kab. Malang, Jawa Timur	Desa Wisata Sudaji, Kab. Buleleng, Bali
4	Desa Wisata Candirejo, Kab. Magelang, Jawa Tengah	Desa Wisata Kakilangit Mangunan, Kab. Bantul, DIY	Desa Wisata Wukirsari, Kab. Bantul, DIY

5	Desa Wisata Jatimulyo, Kab. Kulonprogo, DIY	Desa Wisata Kampung Patin, Kab. Kampar, Riau	
6	Desa Wisata Kandri, Kota Semarang, Jawa Tengah	Desa Wisata Karanganyar, Kab. Magelang, Jawa Tengah	
7	Desa Wisata Karangrejo Borobudur, Kab. Magelang, Jawa Tengah	Desa Wisata Kebonagung, Kab. Bantul, DIY	
8	Desa Wisata Kembang Kuning, Kab. Lombok Timur, NTB	Desa Wisata Kertayasa, Kab. Pangandaran, Jawa Barat	
9	Desa Wisata Lerep, Kab. Semarang, Jawa Tengah	Desa Wisata Kreatif Terong, Kab. Belitung, Kep. Bangka Belitung	
10	Desa Wisata Liang Ndara, Kab. Manggarai Barat, NTT	Desa Wisata Kubu Gadang, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat	
11	Desa Wisata Nglanggeran, Kab. Gunungkidul, DIY	Desa Wisata Pela, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	
12	Desa Wisata Pemuteran, Kab. Buleleng, Bali	Desa Wisata Pulau Untung Jawa, Kab. Kep. Seribu, DKI Jakarta	
13	Desa Wisata Penglipuran, Kab. Bangli, Bali	Desa Wisata Selasari, Kab. Pangandaran, Jawa Barat	
14	Desa Wisata Pentingsari, Kab. Sleman, DIY	Desa Wisata Sumberbulu, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah	
15	Desa Wisata Pujon Kidul, Kab. Malang, Jawa Timur	Desa Wisata Tamansari, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur	
16	Desa Wisata Sesaot, Kab. Lombok Barat, NTB	Desa Wisata Taro, Kab. Gianyar, Bali	

Sumber: <https://sertifikasi.direktoripariwisata.id/baru3/peserta> (diakses 8 Juni 2024)

Penelitian ini menelaah praktik terbaik (*best practice*) tata kelola desa wisata yang telah mencapai kemandirian. UN-Habitat (dalam Prasjo dkk., 2004, h. 5) mendefinisikan praktik terbaik sebagai inisiatif yang memberikan kontribusi menonjol bagi kualitas hidup, dengan tiga ciri: dampak (*impact*), kemitraan (*partnership*), dan keberlanjutan (*sustainability*). Atas dasar itu, Desa Wisata Nglanggeran di Kabupaten Gunungkidul dipilih sebagai lokus, satu dari hanya 36 desa (0,6%) yang tergolong mandiri, sekaligus termasuk desa wisata bersertifikat berkelanjutan (Tabel 1.1). Dalam penelitian studi kasus, posisi demikian dikenal

sebagai kasus paradigmatik (*paradigmatic case*): bernilai tinggi justru karena daya kejutnya, bukan karena keterwakilannya (Flyvbjerg, 2006, h. 232).

Aktivitas konservasi di Desa Wisata Nglanggeran dimulai pada 1999 oleh Karang Taruna setempat. Formalisasi sebagai desa wisata dan pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) berlangsung pada tahun 2008. Sejak itu, Desa Wisata Nglanggeran meraih penghargaan dari tingkat kabupaten hingga dunia, dengan puncak penetapan sebagai Desa Wisata Terbaik oleh UNWTO pada 2021 (Gambar 1.6 dan 1.7).



Gambar 1.6. Sertifikat Desa Wisata Nglanggeran Berkelanjutan

Sumber: Observasi Lapangan, Agustus 2024



Sepanjang 2001–2021, Desa Wisata Nglanggeran meraih 28 penghargaan tingkat nasional, ASEAN, dan dunia. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut.

- Juara I DIY Penyelamat Lingkungan (Kalpataru) tahun 2009.
- Cipta Award dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2011.
- Kader Konservasi Tingkat Nasional dari Kementerian Kehutanan pada tahun 2013.
- Juara II Nasional Desa Wisata tahun 2013.
- ASEAN Community-Based Tourism Award tahun 2017.
- ASEAN Sustainable Tourism Award (ASTA) tahun 2018.
- Sertifikat Desa Wisata Berkelanjutan tahun 2020.
- Desa Wisata Terbaik (Best Tourism Village) UNWTO tahun 2021.

Sumber: Observasi Lapangan, Agustus 2024

Keterpilihan Desa Wisata Nglanggeran terlihat lebih tajam ketika dibandingkan dengan penerima penghargaan tata kelola desa wisata yang paling selektif. Sepanjang 2017–2025, hanya 13 desa wisata Indonesia yang meraih ASEAN Community-Based Tourism Award, dengan Desa Wisata Nglanggeran sebagai salah satu dari tiga penerima pertama pada 2017 (Tabel 1.2). Untuk penghargaan Best Tourism Village UNWTO (Tabel 1.3), sepanjang 2021–2025 hanya lima desa Indonesia yang terpilih; Desa Wisata Nglanggeran adalah satu-satunya penerima pada tahun pertama gelaran tersebut (2021), ketika dari 174 desa yang diusulkan oleh 75 negara, hanya 44 yang dipilih (UNWTO, 2021b).

Tabel 1.2 Desa Wisata Indonesia Penerima ASEAN Community-Based Tourism Award
Tahun 2017 sampai 2025

No	Desa Wisata	Lokasi	Tahun
1	Nglanggeran	DI Yogyakarta	2017
2	Dieng Kulon	Jawa Tengah	2017
3	Penglipuran	Bali	2017
4	Pentingsari	DI Yogyakarta	2023
5	Pemuteran	Bali	2023
6	Wae Rebo	Nusa Tenggara Timur	2023
7	Tamansari	Jawa Timur	2023
8	Silokek	Sumatera Barat	2023
9	Terong	Kep. Bangka Belitung	2025
10	Semen	Jawa Timur	2025
11	Taro	Bali	2025
12	CMC Tiga Warna	Jawa Timur	2025
13	Botubarani	Gorontalo	2025

Sumber: diolah dari Kemenparekraf RI; Tempo (2017); Kompas (2023, 2025)

**Tabel 1.3 Desa Wisata Indonesia Penerima Best Tourism Village UNWTO
Tahun 2021 sampai 2025**

No	Desa Wisata	Lokasi	Tahun
1	Nglanggeran	DI Yogyakarta	2021
2	Penglipuran	Bali	2023
3	Jatiluwhih	Bali	2024
4	Wukirsari	DI Yogyakarta	2024
5	Pemuteran	Bali	2025

*Sumber: diolah dari UNWTO (2021a, 2023) dan UN Tourism (2024, 2025);
Kemendikbudristek RI*

Capaian tersebut juga terlihat dari angka-angka ekonomi. Omzet yang mulai dicatat pada 2012 sebesar Rp81 juta tumbuh hampir 40 kali lipat menjadi Rp3,25 miliar pada 2019. Pandemi menekan angka tersebut secara drastis pada 2020–2021, tetapi omzet pulih sepenuhnya pada 2023 menjadi Rp3,26 miliar. Data lengkap kunjungan dan omzet disajikan pada Tabel 1.4.

**Tabel 1.4 Jumlah Pengunjung dan Omzet Desa Wisata Nglanggeran
Tahun 2008–2023**

Tahun	Jumlah Pengunjung	Omzet (Rupiah)
2008	1.536	Belum dilakukan penghitungan
2009	2.400	Belum dilakukan penghitungan
2010	7.446	Belum dilakukan penghitungan
2011	16.582	Belum dilakukan penghitungan
2012	27.875	81.225.000
2013	85.658	424.690.000
2014	325.303	1.422.915.000
2015	255.917	1.541.990.000
2016	172.863	1.801.710.500
2017	151.035	1.922.654.600
2018	142.179	3.236.503.900
2019	119.547	3.254.225.400
2020	61.650	1.119.133.000
2021	51.759	809.898.000

2022	75.392	2.383.077.000
2023	70.676	3.258.926.000

Sumber: Observasi Lapangan 2024 dan dokumen Laporan Praktik Baik Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Desa Wisata Nglanggeran (Pokdarwis Nglanggeran, 2023)

Kunjungan mencapai puncaknya pada 2014 (325.303 pengunjung), tetapi omzet terus naik hingga 2019 meski kunjungan menurun, menandakan peningkatan nilai ekonomi per pengunjung. Daya pulihnya tampak dari omzet yang kembali ke tingkat pra-pandemi pada 2023 (Tabel 1.4).

Pada 1999 kawasan Gunung Api Purba gersang akibat penambangan kayu dan batu. Pemerintah Desa menyerahkan hak pengelolaan kawasan 48 hektare kepada Karang Taruna Bukit Putra Mandiri melalui SK Kepala Desa Nomor 05/KPTS/1999. Inisiatif itu lahir dari kebutuhan pemuda akan sumber pembiayaan kegiatan sosial sekaligus sebagai respons atas kerusakan lingkungan, bukan dari program pemerintah: ketika kawasan dijaga, air tersedia, dan sawah panen dua kali setahun (observasi lapangan, 2025).

Orientasi ke pariwisata baru muncul setelah gempa Yogyakarta 2006, ketika relawan dari luar daerah menyadarkan warga bahwa kawasan yang selama ini dianggap biasa menyimpan daya tarik luar biasa. Dari momentum itu lahir Badan Pengelola Desa Wisata (BPDW) pada 2007 yang kemudian bertransformasi menjadi Pokdarwis pada 2008. Lintasan dari inisiatif swadaya 1999 hingga pengakuan internasional 2021 memenuhi tiga ciri praktik terbaik yang dirumuskan UN-Habitat (Prasojo dkk., 2004, h. 5): dampak (pertumbuhan omzet 40 kali lipat beriringan dengan pelestarian kawasan), kemitraan (jejaring dari Karang Taruna

hingga UNWTO), dan keberlanjutan (daya pulih pascapandemi serta pelibatan generasi muda sejak usia sekolah dasar) (observasi lapangan, 2025).

Rentang 26 tahun menjadi bingkai analisis karena di dalamnya seluruh transformasi, dari perintisan hingga kemandirian yang teruji, terbaca utuh, sementara sebagian besar kajian tata kelola kolaboratif hanya merekam penggalan pendek dari proses yang jauh lebih kompleks (Emerson & Nabatchi, 2015, h. 183; Ulibarri dkk., 2020, h. 617). Posisi unik Desa Wisata Nglanggeran membuka dua kesenjangan yang perlu diisi. Dari sisi empiris, belum ada studi yang secara khusus mengkaji praktik terbaik tata kelola kolaboratif desa wisata berkelanjutan dengan pengakuan internasional. Penelitian terdahulu cenderung membahas aspek-aspek terpisah, seperti kearifan lokal, dampak ekonomi, atau pemberdayaan masyarakat. Studi longitudinal multidekade tentang faktor kunci keberhasilan transformasi desa wisata, dari perintisan hingga pengakuan global, masih belum tersedia.

Dari sisi teoretis, kerangka kerja integratif untuk tata kelola kolaboratif yang dikembangkan Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) memiliki tiga ruang yang belum tergarap. Pertama, sebagian besar penerapannya berbasis pada kasus dari Amerika Utara dan Eropa Barat, sementara struktur komunal pedesaan Jawa memiliki karakter khas (Antlov, 2003, h. 193; Berenschot dkk., 2017, h. 9). Kedua, durasi penelitian terdahulu yang umumnya hanya 3–5 tahun belum memadai untuk membaca rezim kolaboratif yang berkembang dalam waktu panjang dan perlu dipahami dari waktu ke waktu secara utuh (Emerson & Nabatchi, 2015, h. 183). Ruang ketiga yang belum banyak digarap adalah bagaimana kolaborasi bertahan

saat krisis dan bagaimana rezim justru menguat setelahnya. Ulibarri dkk. (2020, h. 617), yang melibatkan Emerson sendiri sebagai salah satu penulisnya, mengakui bahwa “*few studies assess the evolution of the structure or process dynamics of CGRs over time.*” Data 26 tahun Desa Wisata Nglanggeran memberikan jawaban empiris atas pertanyaan tersebut.

Kesenjangan itu menuntut model tata kelola kolaboratif yang berkelanjutan, lahir dari praktik di lapangan. Penelitian ini menggunakan kerangka kerja integratif Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) sebagai lensa analitis, dengan tiga lapisan yang saling berkaitan: konteks sistem (*system context*) beserta faktor pendorong (*drivers*), rezim tata kelola kolaboratif (*collaborative governance regime*) yang mencakup dinamika dan tindakan kolaboratif, serta dampak (*impacts*) yang memicu adaptasi. Kerangka ini diposisikan sebagai alat bantu analisis yang terbuka untuk diperkaya oleh temuan lapangan dari konteks komunal Jawa, bukan proposisi yang hendak diuji kebenarannya (lihat juga Subbab 3.1). Sifatnya yang menyeluruh dan diakronik sesuai dengan penelusuran transformasi selama 26 tahun. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal mendalam yang berpijak pada paradigma konstruktivisme sosial.

Desa Wisata Nglanggeran diperlakukan sebagai kasus paradigmatis yang menyimpan banyak informasi untuk pembelajaran yang lebih mendalam. Strategi penelusuran proses (*process tracing*) dengan dua varian diterapkan: varian eksplanasi-hasil untuk menelaah proses transformasi dan faktor kunci keberhasilan,

serta varian pembangunan teori untuk merumuskan model yang dapat ditransfer. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 14 informan kunci, observasi partisipatif, diskusi kelompok terfokus, serta penelusuran dokumen historis pada periode 1999–2025. Berdasarkan kondisi tersebut, pertanyaan besar penelitian dirumuskan sebagai berikut.

Bagaimana model tata kelola kolaboratif berkelanjutan dapat dirumuskan berdasarkan transformasi Desa Wisata Nglanggeran?

1.2. Rumusan masalah

Pertanyaan besar di atas dijabarkan ke dalam tiga rumusan masalah yang berjenjang dan saling menopang secara logis. Rumusan masalah pertama bersifat deskriptif-analitis, rumusan masalah kedua bersifat eksplanatif, dan rumusan masalah ketiga bersifat konstruktif.

1. Bagaimana proses transformasi tata kelola kolaboratif berkelanjutan di Desa Wisata Nglanggeran sepanjang 1999–2025?
2. Apa saja faktor kunci keberhasilan transformasi tata kelola kolaboratif berkelanjutan di Desa Wisata Nglanggeran?
3. Bagaimana model tata kelola kolaboratif berkelanjutan dapat dirumuskan berdasarkan transformasi Desa Wisata Nglanggeran?

1.3. Tujuan penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah menyusun model tata kelola kolaboratif berkelanjutan berdasarkan transformasi Desa Wisata Nglanggeran, dengan

kerangka kerja integratif Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) sebagai lensa analitis yang memandu penelusuran proses dan diperkaya oleh temuan lapangan.

Secara lebih khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis proses transformasi tata kelola kolaboratif di Desa Wisata Nglanggeran sepanjang 1999–2025 melalui pendekatan penelusuran proses varian eksplanasi-hasil, dengan kerangka kerja integratif Emerson dkk. (2012) sebagai lensa analitis.
2. Mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor kunci keberhasilan transformasi tata kelola kolaboratif berkelanjutan di Desa Wisata Nglanggeran melalui pendekatan penelusuran proses varian eksplanasi-hasil.
3. Menyusun model tata kelola kolaboratif berkelanjutan dari transformasi Desa Wisata Nglanggeran melalui pendekatan penelusuran proses varian pembangunan teori, meliputi model eksisting yang menggambarkan tata kelola aktual serta usulan model rekomendasi yang dapat ditransfer ke konteks lain sebagai sumbangan teoretis dan rujukan praktis.

1.4. Manfaat penelitian

Luaran utama penelitian ini adalah model tata kelola kolaboratif berkelanjutan yang diharapkan memberikan manfaat dalam dua arah: pengembangan teori tata kelola kolaboratif dan praktik pengelolaan desa wisata di Indonesia.

1.4.1. Manfaat teoretis

Penelitian ini memperkaya kerangka kerja integratif Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) pada dimensi waktu panjang dan konteks non-Barat melalui empat sumbangan inti:

- a. Pengayaan dimensi temporal melalui pemetaan proses transformasi: penelusuran 26 tahun (1999–2025) merumuskan empat tahap siklus berpola spiral (Inisiasi; Ekspansi; Konsolidasi Kualitas; Resiliensi dan Inovasi).
- b. Integrasi kearifan lokal *Hamemayu Hayuning Bawana* sebagai sumber legitimasi internal yang ditempatkan dalam konteks sistem dan motivasi bersama pada model eksisting, serta pada tiga titik fungsional dalam model rekomendasi.
- c. Perumusan pelembagaan adaptif sebagai mekanisme keberlanjutan, yaitu pelembagaan formal yang mengikuti dan melayani praktik kolaborasi yang sudah berjalan.
- d. Identifikasi pola koalisi (*shared governance* dalam pengertian Provan dan Kenis, 2008) pada fase matang rezim tata kelola, sebagai lapisan analitis tambahan yang memperlihatkan pergeseran dari kolaborasi situasional menuju keterikatan antaraktor yang lebih permanen dan saling mengunci (*interlocking*, Mizruchi, 1996).

1.4.2. Manfaat guna laksana

Manfaat penelitian diarahkan pada empat kelompok pemangku kepentingan.

- a. Bagi pemerintah pusat dan daerah, model yang dihasilkan menjadi rujukan kebijakan pengembangan desa wisata berbasis penguatan kapasitas internal komunitas. Empat tahap siklus model rekomendasi dapat digunakan sebagai kerangka penjelas jalur peralihan antarkategori rintisan, berkembang, maju, dan mandiri.
- b. Bagi pengelola desa wisata di seluruh Indonesia, model ini menyajikan peta tata kelola yang dapat diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakter daerah masing-masing.
- c. Bagi lembaga pendidikan tinggi yang menjalankan pengabdian masyarakat, model ini menjadi acuan pendampingan desa wisata yang berorientasi pada keberlanjutan lintas generasi, bukan sekadar pelatihan jangka pendek.
- d. Bagi komunitas akademik tata kelola kolaboratif, penelitian ini menyediakan model yang dapat diuji ulang dalam konteks desa wisata lain di Indonesia maupun di negara-negara Asia dengan struktur komunal yang serupa.

1.5. Sistematika disertasi

Disertasi ini disusun dalam enam bab:

Bab I Pendahuluan memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika disertasi. Bab ini meletakkan dasar mengapa penelitian dilakukan, apa yang dipersoalkan, dan ke mana hasilnya diarahkan.

Bab II Review Literatur Komprehensif menguraikan studi terdahulu yang relevan dengan tata kelola kolaboratif dan desa wisata, kerangka teori yang berpusat pada

kerangka kerja integratif Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) sebagai lensa analitis, serta kerangka pemikiran penelitian, sekaligus menegaskan posisi dan kebaruan penelitian terhadap karya terdahulu.

Bab III Metode Penelitian menjelaskan paradigma penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, identitas informan, uji keabsahan data, serta teknik analisis data. Pendekatan utama yang digunakan adalah penelusuran proses (*process tracing*) dengan dua varian, yaitu eksplanasi-hasil (*explaining-outcome*) untuk Rumusan Masalah Pertama dan Kedua, serta pembangunan teori (*theory-building*) untuk Rumusan Masalah Ketiga. Bab ini juga memuat keterangan tentang transparansi penggunaan kecerdasan buatan dalam proses analisis dan penulisan.

Bab IV Gambaran Umum memberikan gambaran umum tentang konteks dan lokasi penelitian, yaitu Desa Wisata Nglanggeran di Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bab ini meliputi latar geografis dan demografis, sejarah singkat desa, struktur pengelolaan yang berlangsung selama penelitian dilakukan, serta gambaran umum perjalanan transformasi yang menjadi unit analisis penelitian, sebagaimana dianalisis pada Bab V.

Bab V, Temuan dan Pembahasan Komprehensif, menyajikan jawaban atas tiga rumusan masalah secara berurutan. Subbab 5.1.1 menjawab Rumusan Masalah Pertama dengan membaca transformasi tata kelola Desa Wisata Nglanggeran melalui kerangka Emerson dkk. (2012) yang mencakup konteks sistem, faktor pendorong, dinamika kolaborasi, tindakan kolaboratif, dampak, dan adaptasi.

Subbab 5.1.2 menjawab Rumusan Masalah Kedua dengan mengidentifikasi faktor kunci keberhasilan melalui pendekatan penelusuran proses dan empat tes *Bayesian*.

Subbab 5.1.3 menyajikan model eksisting sebagai jawaban deskriptif Rumusan Masalah Ketiga, sedangkan model rekomendasi dirumuskan pada Subbab 5.2.3.2 sebagai jawaban konstruktif berdasarkan dialog teoretis. Subbab 5.2 mendialogkan temuan dengan literatur tata kelola kolaboratif, kepemimpinan, pembangunan komunitas, dan studi desa wisata di Indonesia, serta menarik sumbangan teoretis dan praktis bagi penelitian.

Bab VI Penutup berisi kesimpulan, kebaruan dan kontribusi keilmuan, implikasi penelitian, rekomendasi kebijakan, keterbatasan penelitian dan saran penelitian lanjutan, serta refleksi teoretis dan penutup. Bab ini menutup perjalanan disertasi dengan menyatakan secara ringkas jawaban atas tiga rumusan masalah dan pertanyaan besar penelitian, merumuskan tiga jalur implikasi sumbangan penelitian, mengakui keterbatasan penelitian secara terbuka, serta menempatkan sumbangan penelitian pada peta literatur tata kelola kolaboratif dan studi desa wisata di Indonesia.